

Tragedi 1965 dan Peristiwa Madiun 1948

Ada baiknya kita merenungkan kembali jejak langkah perjalanan bangsa yang berdarah-darah, ... jangan sampai terulang kembali! Mungkinkah dengan bersikap menutupi dan dilewatkan begitu saja, atau arus yang berpendapat janganlah borok lama yang sangat menyakitkan itu diungkap kembali dengan mengutamakan menatap saja kedepan lebih baik, ...? Bisakah dengan begitu kekejaman kemanusiaan tidak terjadi kembali? Tentu saja tidak! Karena dengan demikian bangsa ini belum berhasil menemukan akar masalah terjadi kekejaman itu dan tidak berhasil menyimpulkan KESALAHAN yang terjadi! Begitulah setelah jatuh ribuan korban di Peristiwa Madiun, terulang kembali di tahun 1965 dengan KORBAN lebih dahsyat, baik dari segi jumlah KORBAN maupun kekejaman yang dilakukan, ...!

Sampai sekarang, sekalipun sudah lewat 52 tahun, pada saat KORBAN 1965 menuntut KEADILAN, segera saja dituduh mereka hendak menghidupkan kembali PKI, ... PKI telah BANGKIT kembali! Membaliknya dengan menuduh, bahwa KORBAN yang terjadi itu akibat kekejaman-kekejaman PKI yang masih sangat menggores dalam ingatan masyarakat Peristiwa Madiun 1948! Lalu, apa akar masalah sebenarnya? Tulisan Yunanto Adi tahun yl. dibawah sangat JITU mengungkap masalah, sangat baik untuk dibaca dan direnungkan kembali, ... Kenapa KORBAN 1965 itu harus ikut menanggung kekejaman Peristiwa Madiun yang tidak ada hubungan dengan dirinya itu? Kenapa harus melibatkan "DOSA" PKI itu pada seluruh anggota yang tidak tahu apa2, ...!

Bangsa ini LUPA atau TIDAK BERANI memperhatikan bahwa kita berulang kali diobok-obok oleh CIA-M16! Selalu termakan adu-domba AS-Inggris untuk kepentingan mereka, membasmi KOMUNIS yang dituduh kejam dan ANTI-TUHAN itu! Saat Peristiwa Madiun 1948, kita terjebak *Doktrin Truman* sebagai upaya Amerika menghancurkan kaum merah di seluruh dunia. Sedang dalam kasus 1965, lagi-lagi kita lengah dengan adanya Perang Dingin yang sedang memanas, makin terjepitnya AS menghadang Komunis di VietNam dan usaha Inggris menegakkan Malaysia-Raya yang ditentang keras oleh bung Karno dengan *Ganyang Malaysia!* AS-Inggris sangat berkepentingan menyingkirkan Presiden Soekarno dan untuk itu harus lebih dahulu menggempur pendukung kuatnya, PKI! Ini pertama.

Kedua, katakanlah kenyataan telah terjadi culik-menculik bahkan pembunuhan terhadap walikota, komandan Laskar dan kiyai-kiyai dengan digemborkan kekejaman dilakukan PKI saat Peristiwa Madiun 1948 itu. Tapi INGAT, pemerintah Hatta ketika itu, juga sudah

menembak mati tokoh-tokoh utama PKI yang dianggap harus bertanggungjawab atas tuduhan Pemberontakan Madiun! Dan tidak berhenti sampai disitu, kenyataan juga terjadi penangkapan dan pembantaian terhadap lebih 8000 orang yang dituduh PKI! Dan semua itu juga dilakukan tanpa proses HUKUM yang berlaku!

Tanya Yunantyo Adi: *"Tangis Roeslan Abdoelghani setelah diminta menyaksikan pembunuhan massal terhadap warga eks PKI dalam kasus Madiun 1948 di sebuah sekolah (Roeslan Abdoelghani Tokoh Segala Zaman, 2002), mau ditutup-tutupi; kenapa?"*

Fakta sejarah bahwa Panglima Besar Jendral Soedirman setelah menyaksikan sendiri kekejaman dalam pembantaian terhadap warga PKI dalam rentang bulan November 1948 juga mau ditutup-tutupi; kenapa? Setelah menyaksikan pembantaian terhadap warga PKI itu, di penghujung November 1948 Soedirman pulang ke rumah, ia syok dan mengeluh pada istri, dan menurut anaknya yang bernama Muhammad Teguh Bambang (2012), Soedirman mengalami tekanan batin, habis mandi tergolek lemas, sampai-sampai menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih (Tim Tempo, Soedirman, Seorang Panglima, Seorang Martir, 2012, hal 26). "

Karena pengalaman Peristiwa Madiun itu tidak disimpulkan dengan baik, ternyata kekejaman kemanusiaan terulang terjadi kembali di tahun 1965, bahkan dengan skala yang lebih dahsyat, baik kekejamannya maupun jumlah KORBAN warga tidak berdosa! Setelah 6 jenderal + 1 perwira jatuh korban, diikuti dengan tokoh-utama PKI, Aidit, Lukman dan Njoto dibunuh begitu saja tanpa proses HUKUM, jenderal Suharto meneruskan TUGAS yang diemban dari AS, MEMBASMI KOMUNIS dengan pengejaran, penangkapan dan pembantaian terhadap JUTAAN warga yang dituduh komunis, simpatisan dan bahkan Soekarno, ...! Kembali Nusantara bersimbah DARAH!

Bukan hendak membandingkan siapa yang lebih KEJAM, dan lalu balas berbalas dendam sesama warga, tapi masing-masing pihak yang bertikai harus bisa menemukan jalan keluar terbaik! Duduk bersama mendiskusikan dimana masalah terjadi, dan KESALAHAN-KESALAHAN yang tidak seharusnya diteruskan! Selama jenderal Suharto, orang yang paling bertanggungjawab atas Peristiwa kejahatan Negara 1965 itu bisa diakui Pemerintah yang berkuasa, sulit bisa mengakhiri dan menuntaskan kejahatan-negara dan kekejaman kemanusiaan bisa dihindari terulang kembali.

Salam,
ChanCT

Tragedi 1965 dan Peristiwa Madiun 1948

Oleh Yunantyo Adi *

<http://ypkp1965.org/blog/2016/06/05/tragedi-1965-dan-peristiwa-madiun-1948/>



SIMPOSIUM TANDINGAN: Simposium "tandingan" yang digelar para purnawirawan TNI di Balai Kartini (1-2/6) Jakarta. [Foto: FF]

Pengantar Redaksi:

Wacana rekonsiliasi dalam Simposium Nasional "Bedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diinisiasi pemerintah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965-66; telah memunculkan respons luas bahkan cenderung bias. Salah satunya adalah upaya mengait-kaitkan Tragedi 65 dengan Peristiwa 1948, seolah untuk menemukan pijakan legitimasi kenapa Tragedi 65 pun terjadi; dengan segala resiko turunannya.

Reaksi demikian lebih mirip sebuah kepanikan pihak tertentu, terutama dalam hal ini para mantan jenderal AD yang pada gilirannya menggelar sebuah "simposium nasional tandingan".

Tulisan Yunantyo Adi berikut ini diharapkan dapat membantu melihat lebih jernih dan mendudukan persoalan -yang dibiaskan- itu secara adil, seadil-adilnya...

* * *

Saya sejak awal memang menolak membawa-bawa masalah *Peristiwa Madiun 1948* dalam pembicaraan *Tragedi 1965*. Saya tidak bermaksud menutupi peristiwa kekejaman-kekejaman yang terjadi pada tahun 1948; sama sekali tidak.

Tetapi begini, kita ini membincang *Peristiwa 1965* tanpa *Pertistiwa 1948* itu sudah amat sulit, dan membincang *Peristiwa 1948* tanpa *Peristiwa 1965* itu pun sesungguhnya sudah

amat sulit. Pun ruang dan waktu antara kedua peristiwa itu juga terpaut relatif jauh, dengan situasi nasional dan internasional yang juga berbeda.

Anda berada di dalam partai apa pun, entah PKI, PSII, Partai Masyumi, PDI, PDIP, Golkar, apapun lah, sepanjang hampir 20 tahun, diri Anda di dalam partai pasti akan mengalami masalah dan posisi internal maupun eksternal yang jauh berlainan.

Yang kita maksud mereka para korban kekerasan tahun 1965-1966, adalah orang-orang yang tak tersangkut tindakan kriminal G30S tetap menjadi korban aksi kekerasan alat-alat negara. Dan mereka juga bukan pelaku-pelaku kriminal dari kekerasan Madiun 1948. Adalah tidak adil, jika ada warga PKI yang memang pelaku kriminal di tahun 1948; kesalahannya ditimpakan kepada seluruh warga PKI, apalagi kok ditimpakan kepada seluruh warga PKI di tahun 1965-1966.

Menghukum para pelaku kriminal semestinya menghukum pelakunya saja, bukan dengan cara membunuh tikus dalam satu rumah dengan bom. Apa yang digembar-gemborkan di sini adalah, seakan Peristiwa 1948 itu adalah kejadian warga PKI membunuh kiai-kiai. Dan itu mau ditarik kesimpulan sebagai pembenar atas kekerasan 1965. Seakan Peristiwa 1948 sesederhana itu, mereka menyuguhkan teks-teks sejarah dengan menutupi usaha-usaha rekonsiliasi antara keluarga-keluarga kiai dengan eks PKI. Juga menutupi kekejaman alat-alat negara dalam membantai warga PKI kala itu, serta menghapuskan pernah adanya penyelesaian Peristiwa 1948 secara negara pada tahun 1949.

Itulah narasi Orde Baru. Dua orang kelahi di jalan saja kita bisa dengar banyak versinya, bagaimana mungkin Peristiwa Madiun 1948 dan Peristiwa 1965 kita mau-maunya dibodohi hanya boleh mendengar satu versi: versi OrBa dengan purnawirawan TNI AD.

Ada perlakuan tidak adil dalam memberlakukan narasi sejarah di sini, yaitu hanya memberlakukan narasi Orde Baru dalam Peristiwa 1948, untuk menjegal upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi atas Peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966.

Ini merupakan cara yg sama di era Orde Baru dulu, narasi 1965 yang disuguhkan ke masyarakat dan generasi penerus adalah narasi Orde Baru hingga sekarang generasi penerus menjadi korban dari narasi itu. Padahal Peristiwa 1948 itu kejadian yang rumit, yang tidak mungkin diambil kesimpulan dari sudut pandang mana pun, kata sejarawan Soe Hok Gie dalam "Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan".

Kalau soal kekejaman, jelas kekejaman terhadap warga PKI sebagai pihak yang kalah dalam kasus Madiun 1948 jauh lebih banyak. Kalau mau jujur (baca "Berbagai Fakta dan

Kesaksian Sekitar Peristiwa Madiun"). Para tawanan yang sudah tak bersenjata dihabisi, dicituk dan dieksekusi malam2 tanpa proses hukum.

Tentang kekejaman ini tentulah hal yang rumit. Sebagai contoh, yg dihadirkan adalah monumen-monumen kekejaman warga PKI terhadap lawan-lawan politiknya di Jatim. Tetapi kekejaman terhadap warga PKI (oleh militer dan non-militer) justru mau ditutup-tutupi seakan tidak pernah ada. Kalau pun nampak ada maka dianggap suatu kewajaran setimpal.

Tindakan itu adalah rekayasa pembodohan nasional terhadap generasi muda. Kekejaman terhadap warga eks PKI dalam kasus Madiun 1948 tidak dibolehkan dibuat monumen-monumen, misalnya kuburan massal warga PKI di Kabupaten Karanganyar dan lainnya, di penjara2 Magelang dan lainnya, penyiksaan massal di Magetan dan lainnya; karena mereka di pihak yang kalah.

Kuburan-kuburan massal warga PKI yang dibantai pada tahun 1965-66 tak dibolehkan dibuat monumen sejak Orde Baru. Kenapa kekejaman terhadap warga eks PKI ditutup-tutupi?



Penyelenggara Simposium Anti PKI menampilkan foto penggalian kuburan massal dan identifikasi kerangka Amir Sjarifoeddin dkk, yang diklaim sebagai foto korban kekejaman PKI. Manipulasi sejarah "klaim" tradisi OrBa [Broer Martin_red]

Dalam simposium nasional "tandingan" yang digelar kalangan Purnawirawan TNI-AD di Balai Kartini (1-2/6/2016) Jakarta baru-baru ini juga tak pernah membahas kekejaman aparat negara terhadap warga PKI dalam kasus Madiun 1948. Tentu saja, yang mereka

mereka gambar-gemborkan tentang kekejaman PKI saja. Semua ini tentu ada tujuannya, dari gambar gembor itu.

Hal sederhana, foto kekejaman terhadap warga PKI di Magetan dalam Simposium Purnawirawan TNI-AD itu ditampilkan dengan caption foto yang terbalik, seakan itu kekejaman PKI terhadap lawan politiknya. Belakangan diketahui bahwa gambar foto yang diklaim merupakan dokumentasi kekejian PKI di Madiun, ternyata itu foto penggalian kuburan massal identifikasi kerangka Amir Sjarifoeddin dkk.

"Memeriksa foto saja sudah tidak becus, bagaimana mungkin Anda mau menggabungkan pembicaraan kasus 1965 kasus 1948 dalam satu lembaran negara?"

Tangis Roeslan Abdoelghani setelah diminta menyaksikan pembunuhan massal terhadap warga eks PKI dalam kasus Madiun 1948 di sebuah sekolah (Roeslan Abdoelghani Tokoh Segala Zaman, 2002), mau ditutup-tutupi; kenapa?

Fakta sejarah bahwa Panglima Besar Jendral Soedirman setelah menyaksikan sendiri kekejaman dalam pembantaian terhadap warga PKI dalam rentang bulan November 1948 juga mau ditutup-tutupi; kenapa?

Setelah menyaksikan pembantaian terhadap warga PKI itu, di penghujung November 1948 Soedirman pulang ke rumah, ia syok dan mengeluh pada istri, dan menurut anaknya yang bernama Muhammad Teguh Bambang (2012), Soedirman mengalami tekanan batin, habis mandi tergoles lemas, sampai-sampai menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih (Tim Tempo, Soedirman, Seorang Panglima, Seorang Martir, 2012, hal 26).

Jadi untuk apa Anda para purnawirawan jenderal dan konco-konconya ini menutupi kekejaman terhadap warga PKI dalam kasus Madiun 1948 yang sedemikian kejinya itu?

Kalau soal pemberontakan, katanya PKI memberontak dalam kasus Madiun 1948; Benarkah itu?

Ini juga soal rumit. Kenyataannya sebelum PM Hatta dan Jendral Nasution menyerbu Madiun, Letkol Soeharto sendiri (kelak Presiden RI), melakukan penyelidikan di Madiun atas perintah Jendral Soedirman, dan ia menyimpulkan PKI tidak memberontak dan tidak ada kekejaman-kekejaman di Madiun (Harry Poeze, Madiun 1848, hal 206).

Pakar militer Prof Salim Said mengungkapkan, Soedirman sendiri menganggap kasus Madiun adalah perkelahian antar laskar yang bisa dileraikan. Namun karena perintah Hatta, Soedirman terpaksa ikut menyerbu. Kenapa fakta ini juga mau ditutup-tutupi?

Banyak hal harus diselidiki tentang Peristiwa Madiun 1948. Kita tidak boleh tunduk pada narasi Orde Baru belaka. Apalagi kok mau tunduk pada narasi buku-buku sekolah pada era Orba karya intelektual murahan itu.

Sekali lagi, membicarakan Madiun 1948 tanpa membicarakan kasus 1965, dan membicarakan masalah 1965 tanpa kasus 1948 adalah sama-sama hal rumit. Bagaimana mungkin Anda bisa secepatnya sendiri mau menggabungkan narasi Madiun 1948 dalam narasi 1965 hanya berdasar narasi purnawirawan militer lulusan Orde Baru itu?

Anda pula mengatakan bahwa, kita selalu berurusan dengan PKI, PKI memberontak. Bukan, salah itu. Bagaimana kalau saya balik begini: Bangsa ini menjadi berurusan dengan PKI dan bukan partai lain, adalah karena kehendak Amerika dan Inggris; dan faksi TNI tertentu yang menjadi kaki tangan Amerika-Inggris itulah yang selalu menghancurkan PKI dengan cara apa pun yang mereka bisa tempuh.

Mau pembuktian? Mari kita sama-sama buktikan keterlibatan agen-agen rahasia Amerika-Inggris ini secara jernih; silakan Saudara kumpulkan sejarawan dan intelektual duduk satu meja dengan Anda. Dan kita membicarakan itu.

Dalam kasus Madiun 1948, tentu Anda ingat adanya *Doktrin Truman* sebagai upaya Amerika menghancurkan kaum merah di seluruh dunia. Dalam kasus 1965 Anda tentu ingat Perang Dingin dan permainan CIA dan kolega Inggrisnya. Kita di Tanah Air menjadi wayang-wayang adu domba, dan purnawirawan TNI baru saja mempertontonkan diri sebagai domba-domba yang tersesat dengan cara menyelenggarakan simposium tandingan (1-2/6) itu. Sudah domba, tersesat pula.

Jadi bagaimana? Jadi saya tetap pada pendapat saya, bahwa pembicaraan soal Madiun 1948 dan Peristiwa 1965 harus dibicarakan secara terpisah. Karena masing-masing mengalami kerumitan-kerumitan sendiri dalam dimensi ruang dan waktu serta konteks yang berbeda.

Tetapi ada kesamaan memang, semua itu tak lepas dari intervensi Amerika dan andil tentara maupun sarjana-sarjana lulusan Barat yang ambil peran dalam usaha-usaha sistematis penghancuran persatuan Nasakom.

Juga tak lepas dari adu domba agen-agen Barat itu pada rakyat sehingga terjadi konflik horizontal yang meluas, massif dan adu cepat untuk saling bunuh.

Sebagai contoh, anak-anak muda Lakspedam NU dalam penelitian mereka di Blitar menemukan fakta bahwa militer memprovokasi warga kampung NU dengan memberi daftar kiai yang seolah mau dibunuh warga PKI. Dan kemudian ke kampung warga PKI lalu memberi daftar warga BTI yang seolah mau dibunuh kiai/santri; sehingga terjadi adu cepat saling bunuh.

Karena kampung kiai/santri yang diberi daftar lebih dulu, mereka menyerbu duluan ke kampung warga PKI. Hal semacam ini biasa terjadi di rentang tahun 1965-1966; juga biasa terjadi di tahun 1948 saat itu.

Jangan salah bahwa sejarah mencatat bangsa kita segera *move-on* pasca-peristiwa Madiun 1948. Secara kenegaraan parlemen masa itu (KNIP) membahas kasus Madiun 1948; dan disadari sama-sama terjadi kekejaman satu sama lain. Masing-masing yang bertikai jatuh korban dalam jumlah besar dan mengenaskan.

Setelah melalui perdebatan alot, parlemen memutuskan untuk bekerjasama kembali dan sepakat tidak saling gugat.

Pemerintah RI sendiri membuktikan dirinya untuk tidak menggugat terhadap lawan politiknya di Madiun. Hal ini dibuktikan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 7 Sept 1949 yang diteken Menkeh Soesanto Tirtoprodjo.

Sewajarnya, versi perihal Madiun 1948 dibebaskan beredar, bukan malah hanya manipulasi versi OrBa saja yang diedarkan jadi konsumsi publik luas.

Di era Soekarno, kata Soemarsono dalam Revolusi Agustus (2008), PKI bebas mengemukakan versinya walau PKI di pihak yang kalah.

Nah, kalau kita mau membahas Peristiwa Madiun 1948 secara fair, mestinya Simposium Purnawirawan TNI, [fihak yang nampak panik ini_Red] berani mengemukakan versi PKI; sebagaimana terjadi dalam **Simposium Nasional Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan** (18-19 April 2016).

Pada simposium mana diundang pula semua elemen (termasuk warga eks PKI maupun TNI dan lain-lain, persoalan Menhan dan unsur TNI lainnya tak hadir bukan salah panitia).

Peristiwa 1948 telah ada penyelesaian negara. Peristiwa G30S di Lubang Buaya juga telah diproses hukum di Mahmilub.

Tapi bagaimana dg kekejaman alat-alat negara pasca peristiwa G30S terhadap korban kekerasan Tragedi 1965 yang terjadi tahun 1965-1966, di mana mereka para korban justru tak tahu-menahu kejadian di Lubang Buaya?

Tidaklah pantas membawa-bawa Peristiwa Madiun 1948 dengan versi yang amburadul, hanya untuk kepentingan memprovokasi dan menebar kebencian umum di kalangan rakyat.

Kita harusnya belajar pada warga NU, anak-anak muda yang *move-on* dan mengajarkan rekonsiliasi kultural atas peristiwa masa lalu; baik di Blitar maupun di tempat-tempat lain. Kita juga harus belajar pada Ketua Pemuda Pancasila Sulteng Rusdy Mastura yang waktu jadi wali kota Palu melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi kultural pada korban Tragedi 1965 secara kenegaraan (kepemerintahan daerah).

Juga kita mestinya tak lupa pada apa yang telah dilakukan Dahlan Iskan (CEO Jawapos) yang merekonsiliasi para pihak yang bertikai dalam kasus Madiun 1948 di Magetan, Jatim. Juga kita mestinya belajar pada mahasiswa, anak-anak muda dan Pemda di Semarang yang membuatkan makam layak bagi korban Tragedi 1965 di kuburan massal kawasan Plumbon.

Sewajarnya kita belajar pada hal-hal yang sejuak atas peristiwa kekerasan terhadap kemanusiaan di masa lalu, bukan malah mempermainkan data, apalagi memanipulasi untuk memprovokasi dan mereproduksi kekerasan lanjutan, membubarkan diskusi-dikusi bertema sejarah maupun HAM, dan sebagainya.

Ketika negara berkehendak mengupayakan pengungkapan kebenaran dan pelurusan sejarah, rehabilitasi, reparasi, dan rekonsiliasi atas korban kekerasan alat-alat koersif negara di masa lalu, tak sewajarnya Anda malah mengobarkan api peperangan dan potensi kerusakan. Kecuali jika ingin disebut sebagai penjaga dan pemuja impunitas yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal.

Semarang, 5 Juni 2016.

Yunantyo Adi, Pegiat HAM; tinggal di Semarang

Catatan: Setelah Peristiwa Madiun 1948 yang menewaskan kedua belah pihak, ada ulama-ulama lawan PKI yang tewas, di tubuh PKI sendiri 8.000 orang dibantai tanpa proses hukum.

Jenderal Soedirman tetap berpendirian kalau masalah Madiun 1948 bukanlah peristiwa pemberontakan tetapi peristiwa perkelahian antar-laskar yang sejak awal ia yakini bisa dilerai. Soedirman membuktikan keyakinannya itu dengan sejarah. Ia melerai semua laskar yang berkelahi di Madiun, mempersatukannya, dan bekerja sama kembali untuk perang semesta melawan Agresi Belanda.

Berikut adalah salah satu temuan sejarah berupa surat Jend Soedirman yang ditujukan kepada FDR/PKI, Masyumi, dan laskar-laskar lainnya yang sebelumnya bertikai di Madiun 1948, untuk supaya bekerja sama kembali dan bergerilya melawan penjajah.

Surat bersejarah inilah yang selama ini disembunyikan Orde Baru untuk mendiskreditkan dan menstigma PKI sebagai pengacau; hal yang tentu saja nyata-nyata bertentangan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Soedirman. MERDEKA!!!

("Dari Gontor ke Buru", Syarikat, 2002, h. 117-118; "Jenderal Sudirman Pahlawan Kemerdekaan, 1963, h 67-69).